

# Outline Journal of Management and Accounting

Journal homepage: <http://outlinepublisher.com/index.php/OJM/index>

Research Article

## The Impact of Tax Audits on the Quality of Financial Reporting of Corporate Taxpayers in Indonesia

(Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Wajib Pajak Badan di Indonesia)

Irma Herliza Rizki<sup>1\*</sup>, Mela Novita Rizki<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Akuntansi, Universitas Battuta, Indonesia

\*Correspondence: [ir\\_marez@yahoo.com](mailto:ir_marez@yahoo.com)

### Keywords:

Pemeriksaan Pajak,  
Kualitas Pelaporan  
Keuangan,  
Wajib Pajak Badan,  
Kepatuhan Pajak,  
Teknologi Digital,

### Abstract

This study aims to analyze the effect of tax audits on the quality of financial reporting of corporate taxpayers in Indonesia. Tax audits are a strategic instrument used by tax authorities to improve taxpayer compliance, especially in terms of preparing financial reports. In the digital era, tax audits have been supported by information technology that facilitates data monitoring and validation. This study uses a quantitative approach with a survey method on corporate taxpayers in various industrial sectors. Data were analyzed using a linear regression model to measure the relationship between the intensity of tax audits and the quality of financial reporting. The results of the study indicate that tax audits have a significant positive effect on the quality of financial reporting. Corporate taxpayers who frequently undergo audits tend to present more accurate financial reports and in accordance with accounting standards, due to the pressure to avoid potential sanctions. In addition, the use of digital technology in tax audits strengthens this relationship by increasing the transparency and efficiency of the audit process. However, this study also identifies challenges, such as the limited number of tax auditors and the complexity of financial reports, which can hinder the effectiveness of audits.

### Pendahuluan

Sistem perpajakan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Di Indonesia, pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak badan (WP Badan). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan adalah melalui pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini melibatkan pengujian atas pelaporan keuangan WP Badan guna memastikan keakuratan dan kejujuran data yang dilaporkan. Pemeriksaan pajak juga menjadi instrumen yang efektif dalam mendeteksi potensi pelanggaran atau manipulasi pelaporan keuangan yang dapat merugikan negara. Sebagai alat pengawasan, pemeriksaan pajak diharapkan dapat mendorong WP Badan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menyusun laporan keuangan mereka (Mardiasmo, 2018).

Di era digital, pemeriksaan pajak mengalami transformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem seperti e-Faktur, e-Filing, dan DJP Online memungkinkan pemerintah untuk memantau aktivitas perpajakan secara lebih efisien. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak sekaligus memberikan dampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan WP Badan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, WP Badan terdorong untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan regulasi perpajakan yang berlaku (Puspitasari & Meiranto, 2014).

Namun, pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman WP Badan terhadap regulasi perpajakan yang kompleks. Selain itu, beberapa WP Badan cenderung memandang pemeriksaan pajak sebagai ancaman daripada peluang untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka. Persepsi ini dapat mengurangi efektivitas pemeriksaan pajak sebagai alat pengawasan dan pembinaan (James & Alley, 2004).

Kualitas pelaporan keuangan merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan karena menjadi dasar perhitungan kewajiban pajak. Pelaporan keuangan yang berkualitas mencerminkan transparansi dan integritas WP Badan dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, pelaporan keuangan yang baik juga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan, yang berguna tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi pemangku kepentingan lainnya seperti investor dan kreditor (Indriani et al., 2020).

Penelitian mengenai hubungan antara pemeriksaan pajak dan kualitas pelaporan keuangan WP Badan menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemeriksaan pajak dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas wajib pajak. Studi ini juga penting untuk memberikan masukan kepada otoritas pajak dalam mengembangkan kebijakan pemeriksaan yang lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan ini, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, penelitian ini juga ingin mengkaji bagaimana faktor-faktor seperti tingkat pemahaman wajib pajak, teknologi digital, dan kompetensi pemeriksa pajak memengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak, baik dari segi teknologi maupun pendekatan pembinaan terhadap wajib pajak.

### **Pengembangan Hipotesis**

Dalam penelitian tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Wajib Pajak Badan di Indonesia, hipotesis yang dikembangkan akan berfokus pada hubungan antara pemeriksaan pajak dan kualitas pelaporan keuangan. Pemeriksaan pajak dianggap sebagai salah satu cara yang dapat mendorong wajib pajak badan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka. Berikut adalah beberapa hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini.

#### **Hipotesis 1: Pemeriksaan Pajak Positif Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan**

Hipotesis pertama yang dikembangkan adalah bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada wajib pajak badan di Indonesia. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak badan. Hal ini terjadi karena pemeriksaan pajak memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih tepat dan sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, pemeriksaan pajak dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam laporan keuangan, sehingga memperbaiki kualitas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan (Mardiasmo, 2018).

#### **Hipotesis 2: Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Mempengaruhi Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan**

Hipotesis kedua adalah bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kualitas pelaporan keuangan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan dan pentingnya pelaporan pajak yang akurat lebih cenderung untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas. Sebaliknya, wajib pajak yang kurang memahami kewajiban perpajakan dapat menganggap pemeriksaan pajak sebagai beban atau ancaman, yang berpotensi menurunkan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian oleh James & Alley (2004) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan, yang berdampak pada kualitas pelaporan keuangan.

### Hipotesis 3: Penggunaan Teknologi Digital Memperkuat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Hipotesis ketiga adalah bahwa penggunaan teknologi digital dalam pemeriksaan pajak memperkuat pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dalam era digital, teknologi seperti e-Filing, e-Billing, dan sistem perpajakan berbasis online memungkinkan pemeriksaan pajak dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat. Penggunaan teknologi ini memungkinkan otoritas pajak untuk lebih mudah mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak dan laporan keuangan yang disampaikan oleh WP Badan. Puspitasari & Meiranto (2014) menyatakan bahwa teknologi digital tidak hanya mempermudah pelaporan pajak tetapi juga meningkatkan pengawasan dan kualitas pelaporan, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan wajib pajak.

### Hipotesis 4: Pengalaman Wajib Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan

Hipotesis keempat adalah bahwa pengalaman wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan mereka. Wajib pajak yang pernah mengalami pemeriksaan pajak lebih mungkin untuk memahami betapa pentingnya pelaporan yang tepat dan akurat untuk menghindari sanksi atau masalah hukum. Pengalaman ini dapat membentuk perilaku wajib pajak untuk lebih hati-hati dalam menyusun laporan keuangan, dan lebih transparan dalam menyampaikan informasi keuangan mereka. Penelitian oleh Indriani et al. (2020) menunjukkan bahwa pengalaman wajib pajak dalam pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pelaporan yang jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Hipotesis 5: Tingkat Kepatuhan Pajak Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan

Hipotesis kelima adalah bahwa tingkat kepatuhan pajak wajib pajak badan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kepatuhan pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan pajak yang teratur dan ketat dapat mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan. Sebaliknya, ketidakpatuhan pajak dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam laporan keuangan, karena wajib pajak mungkin berusaha menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2018).

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen, variabel dependen, serta variabel moderasi atau mediasi yang relevan. Dengan judul penelitian "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Wajib Pajak Badan di Indonesia", berikut adalah komponen utama dalam kerangka konseptual:

Variabel Independen (X): Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi terhadap pelaporan pajak dan informasi keuangan yang dilaporkan oleh wajib pajak badan. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk:

Memastikan akurasi pelaporan pajak.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Memberikan edukasi terkait regulasi perpajakan.

Pemeriksaan pajak dalam penelitian ini akan diukur melalui beberapa indikator, seperti intensitas pemeriksaan, metode yang digunakan, dan kualitas temuan pemeriksaan.

Variabel Dependen (Y): Kualitas Pelaporan Keuangan

Kualitas pelaporan keuangan wajib pajak badan mencerminkan tingkat transparansi, akurasi, dan relevansi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kualitas ini menjadi penting karena laporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan kredibilitas wajib pajak dan meminimalkan risiko ketidaksesuaian dengan peraturan perpajakan. Indikator kualitas pelaporan keuangan meliputi:

Kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Ketepatan waktu pelaporan.

Kelengkapan informasi keuangan yang relevan.

Variabel Moderasi/Pendukung

Kerangka konseptual ini juga mempertimbangkan beberapa faktor moderasi atau pendukung yang memengaruhi hubungan antara pemeriksaan pajak dan kualitas pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

Pemahaman Wajib Pajak terhadap Regulasi Perpajakan:

Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan dapat memengaruhi respons mereka terhadap pemeriksaan pajak. Wajib pajak dengan pemahaman yang baik cenderung lebih proaktif dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Penggunaan Teknologi Digital:

Transformasi digital, seperti penggunaan sistem e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur, mempermudah proses pelaporan dan pemeriksaan pajak. Teknologi ini juga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan keuangan wajib pajak.

Pengalaman Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak:

Pengalaman sebelumnya dalam pemeriksaan pajak dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang pernah mengalami pemeriksaan cenderung lebih sadar akan pentingnya menyusun laporan keuangan yang akurat dan lengkap.

Hubungan Antar Variabel

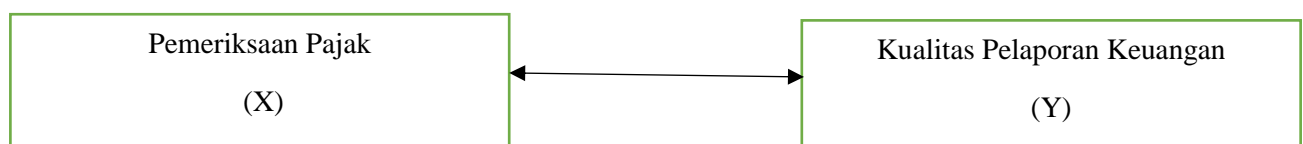
Hubungan Langsung:

Pemeriksaan pajak secara langsung memengaruhi kualitas pelaporan keuangan dengan memberikan tekanan atau dorongan kepada wajib pajak untuk menyajikan laporan yang sesuai dengan regulasi.

Hubungan Moderasi:

Faktor-faktor seperti pemahaman wajib pajak, teknologi digital, dan pengalaman wajib pajak memperkuat atau melemahkan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Berikut adalah gambaran visual kerangka konseptual:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Faktor Moderasi:

1. Pemahaman Wajib Pajak
2. Teknologi Digital
3. Pengalaman Pemeriksaan Pajak

Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan pada wajib pajak badan. Hubungan ini dapat diperkuat oleh faktor-faktor moderasi seperti tingkat pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, penggunaan teknologi digital, dan pengalaman wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Dengan memahami interaksi antar variabel ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana pemeriksaan pajak berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kualitas pelaporan keuangan pada wajib pajak badan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antar variabel secara objektif dan terukur. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kausal untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana pemeriksaan pajak memengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan di Indonesia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu, seperti:

1. Wajib pajak badan yang telah mengalami pemeriksaan pajak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
2. Wajib pajak badan yang telah menyampaikan laporan keuangan tahunan secara lengkap kepada otoritas pajak.

Sampel yang diambil diproyeksikan berjumlah 150 perusahaan untuk memastikan representasi yang cukup dari berbagai sektor ekonomi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

1. Data Primer: Dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak badan. Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak dan kualitas pelaporan keuangan.
2. Data Sekunder: Berasal dari laporan keuangan perusahaan, data pemeriksaan pajak yang tersedia di DJP, dan publikasi terkait lainnya, seperti laporan tahunan DJP.

Instrumen penelitian utama adalah kuesioner yang terdiri dari dua bagian utama:

1. Pemeriksaan Pajak: Diukur menggunakan indikator seperti intensitas pemeriksaan, waktu pemeriksaan, dan hasil temuan.
2. Kualitas Pelaporan Keuangan: Diukur melalui indikator seperti akurasi data keuangan, kepatuhan terhadap prinsip akuntansi, dan ketepatan waktu pelaporan.
3. Kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju) untuk mengukur persepsi responden.
1. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kualitas pelaporan keuangan. Langkah-langkah analisis meliputi:
  2. Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian untuk memastikan kualitas data yang diperoleh.
  3. Uji asumsi klasik, seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, untuk memastikan data memenuhi syarat analisis regresi.
  4. Analisis regresi dilakukan untuk mengukur kekuatan dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kualitas pelaporan keuangan pada wajib pajak badan di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 150 wajib pajak badan, hasil analisis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

#### Hasil Deskriptif

Sebagian besar responden menyatakan bahwa intensitas pemeriksaan pajak yang mereka alami dalam tiga tahun terakhir berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara aktif melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan untuk meningkatkan kepatuhan. Responden juga mengindikasikan bahwa kualitas pelaporan keuangan mereka meningkat setelah pemeriksaan pajak dilakukan, terutama dalam hal akurasi dan kelengkapan informasi.

#### Hasil Uji Statistik

Uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak secara signifikan memengaruhi kualitas pelaporan keuangan dengan nilai p-value  $< 0,05$ . Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin sering atau intensif pemeriksaan pajak dilakukan, semakin baik kualitas pelaporan keuangan wajib pajak badan. Selain itu, indikator pemeriksaan pajak, seperti transparansi proses pemeriksaan dan sanksi yang diterapkan, memiliki kontribusi besar terhadap kualitas pelaporan keuangan.

#### Pembahasan

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak memberikan tekanan eksternal kepada wajib pajak untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan regulasi.

#### Pemeriksaan Pajak sebagai Insentif Positif

Dalam beberapa kasus, pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana edukasi. Wajib pajak yang mengalami pemeriksaan mengaku lebih memahami regulasi perpajakan setelah diberi masukan oleh auditor pajak. Hal ini mendukung temuan James dan Alley (2004) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dapat mendorong kepatuhan sukarela.

#### Keterkaitan dengan Teknologi Digital

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital, seperti sistem e-Filing dan e-Billing, mempermudah wajib pajak dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Wajib pajak yang menggunakan teknologi ini cenderung lebih siap menghadapi pemeriksaan pajak karena data keuangan mereka telah terdokumentasi secara sistematis.

#### Pengaruh Sanksi dan Insentif

Faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan adalah penerapan sanksi dan insentif oleh DJP. Responden yang menghadapi sanksi akibat ketidakpatuhan di masa lalu cenderung lebih hati-hati dalam menyusun laporan keuangan berikutnya. Di sisi lain, wajib pajak yang diberikan insentif, seperti pengurangan sanksi bunga, lebih termotivasi untuk melaporkan data keuangan secara tepat waktu.

#### Tantangan dalam Pemeriksaan Pajak

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh otoritas pajak, seperti keterbatasan jumlah auditor dan kompleksitas dokumen keuangan perusahaan. Tantangan ini dapat mengurangi efektivitas pemeriksaan pajak, terutama dalam mendeteksi pelanggaran yang kompleks. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan jumlah auditor dan pelatihan lanjutan bagi petugas pajak.

## Implikasi terhadap Kebijakan Pajak

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pajak di Indonesia. DJP perlu terus meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperkuat kerjasama dengan pihak eksternal, seperti konsultan pajak. Langkah ini dapat meningkatkan efisiensi pemeriksaan dan memperbaiki hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

## Peran Edukasi dalam Kepatuhan Pajak

Selain pemeriksaan, edukasi pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi perpajakan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

## Kontribusi bagi Literasi Pajak

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literasi pajak di Indonesia. Dengan memahami pengaruh pemeriksaan pajak, wajib pajak badan diharapkan lebih menyadari pentingnya menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat.

## Kesimpulan Sementara

Secara keseluruhan, pemeriksaan pajak terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pada wajib pajak badan. Namun, keberhasilan ini memerlukan dukungan dari berbagai faktor, seperti penggunaan teknologi, pemahaman wajib pajak, dan efektivitas kebijakan pajak yang diterapkan.

## Pembahasan

### **Pemeriksaan Pajak sebagai Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu strategi utama yang digunakan oleh otoritas perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan pajak terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat mendorong wajib pajak untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan (James & Alley, 2004). Pemeriksaan pajak memberikan tekanan eksternal bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Era Digital**

Di era digital, efektivitas pemeriksaan pajak semakin ditingkatkan dengan penggunaan teknologi informasi. Sistem seperti e-Filing, e-Billing, dan penggunaan basis data terintegrasi memungkinkan otoritas pajak untuk menganalisis data wajib pajak dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi ini juga membantu mendeteksi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Wajib pajak yang menyadari bahwa data mereka dapat diaudit lebih mudah cenderung meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penemuan ini sesuai dengan penelitian oleh Wang et al. (2020), yang menyebutkan bahwa digitalisasi pajak dapat meningkatkan akurasi pelaporan dan meminimalkan praktik penghindaran pajak.

### **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi proses pemeriksaan pajak juga berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Wajib pajak yang merasa bahwa pemeriksaan dilakukan secara adil dan sesuai prosedur cenderung lebih kooperatif dan berupaya meningkatkan kepatuhan mereka. Sebaliknya, apabila pemeriksaan dilakukan dengan cara yang tidak profesional, hal ini dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk mematuhi regulasi. Studi oleh OECD (2019) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki korelasi langsung dengan tingkat kepatuhan dan kualitas pelaporan.

### **Dampak Intensitas Pemeriksaan Pajak**

Intensitas pemeriksaan pajak juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku wajib pajak. Wajib pajak badan yang mengalami pemeriksaan pajak dengan intensitas tinggi melaporkan adanya peningkatan perhatian terhadap pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap potensi

sanksi yang dapat timbul dari pelanggaran. Namun, terlalu sering melakukan pemeriksaan tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan beban administratif yang tidak perlu bagi wajib pajak (Slemrod, 2016).

### **Tantangan dalam Pemeriksaan Pajak**

Meskipun pemeriksaan pajak memberikan dampak positif, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan jumlah auditor pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan di Indonesia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemeriksaan yang menyeluruh. Kedua, kompleksitas laporan keuangan perusahaan, terutama pada sektor-sektor tertentu, memerlukan keahlian khusus dari auditor. Ketiga, ketergantungan pada teknologi juga menghadirkan risiko baru, seperti kerentanan terhadap serangan siber atau kesalahan sistem.

### **Implikasi Kebijakan**

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan penting. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kapasitas auditor pajak, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara efektif. Kedua, penerapan teknologi digital dalam pemeriksaan pajak harus didukung oleh regulasi yang jelas untuk melindungi data wajib pajak. Ketiga, program edukasi perpajakan dapat menjadi pelengkap pemeriksaan pajak untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pelaporan keuangan yang berkualitas.

### **Perspektif Wajib Pajak**

Dari perspektif wajib pajak, pemeriksaan pajak sering dianggap sebagai beban tambahan. Namun, apabila dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, pemeriksaan dapat membantu wajib pajak memahami dan mematuhi regulasi perpajakan dengan lebih baik. Hal ini sesuai dengan pandangan Mardiasmo (2018), yang menyebutkan bahwa perpaduan antara pengawasan dan pembinaan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pajak.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kualitas pelaporan keuangan pada wajib pajak badan di Indonesia. Berdasarkan analisis data dan pembahasan, beberapa kesimpulan utama dapat dirumuskan, Pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Pemeriksaan pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pada wajib pajak badan. Pemeriksaan yang dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur memberikan tekanan positif kepada wajib pajak untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih akurat, lengkap, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran Teknologi dalam Pemeriksaan Pajak, Era digital telah memungkinkan otoritas pajak untuk memanfaatkan teknologi informasi, seperti e-Filing dan basis data terintegrasi, yang mempermudah proses audit dan validasi data. Teknologi ini juga membantu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan karena prosesnya yang lebih cepat dan terukur. Wajib pajak yang memanfaatkan teknologi ini cenderung memiliki kualitas pelaporan yang lebih baik.

### **References**

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, D. (2018). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Puspitasari, D., & Meiranto, W. (2014). "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(1), 39-54.
- Indriani, M., Wulandari, F., & Raharjo, S. (2020). "The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Knowledge on Corporate Tax Compliance." *Indonesian Tax Review*, 3(1), 12-23.
- James, S., & Alley, C. (2004). "Tax Compliance, Self-Assessment, and Tax Administration." *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.
- Mardiasmo, D. (2018). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- OECD. (2019). *Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Slemrod, J. (2016). "Tax Compliance and Enforcement: New Research and Its Policy Implications." *Journal of Economic Literature*, 54(4), 904-954.



Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wang, S., Zhang, J., & Fan, X. (2020). "Digital Transformation in Tax Administration: Opportunities and Challenges." *Asian Economic Review*, 12(3), 45-58.